

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik, pada akhir Triwulan I Tahun 2025 (Maret 2025) di Kabupaten Kampar terjadi deflasi year on year (y-on-y) sebesar 0,16 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,12. Sedangkan secara month to month (m-to-m) Kabupaten Kampar mengalami inflasi sebesar 1,62 persen dan secara year to date (y-to-d) Kabupaten Kampar mengalami inflasi sebesar 1,15 persen.

Deflasi y-on-y pada Maret 2025 terjadi disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya lima indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,00 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,70 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,20 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen. Di sisi lain terdapat enam kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga, yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,70 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,19 persen; kelompok transportasi sebesar 0,87 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,46 persen; dan pakaian dan alas kaki sebesar 0,27 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y pada Maret 2025, antara lain: cabai merah, tarif listrik, tomat, bawang merah, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ayam hidup, jengkol, ikan baung, sabun cair/cuci piring, baju muslim wanita, terong, telur ayam ras, kentang, cabai hijau, petai, sepatu pria, labu siam/jipang, baju muslim pria, wortel, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, antara lain: emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, ikan lele, ikan patin, kelapa, cabai rawit, bawang putih, Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), tas sekolah, air kemasan, sepeda motor, mobil, taman kanak-kanak, ikan asin teri, jeruk, semangka, semen, ikan nila dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: tarif listrik, bawang merah, baju muslim wanita, telur ayam ras, kentang, baju muslim pria, semangka, daging ayam ras, ayam hidup, bawang putih, sepatu pria, baju kaos tanpa kerah/t-shirt pria, emas perhiasan, baju anak stelan, daging sapi, jeruk, sepatu anak, sepeda motor, kopi bubuk, ikan patin dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: cabai merah, cabai rawit, sabun cair/cuci piring, tomat, ikan serai, mainan anak, petai, udang basah, kacang panjang, labu siam/jipang, apel, buncis, lemari pakaian, ketimun, kacang tanah, minyak goreng pembasmi nyamuk bakar, tepung terigu, detergen cair dan beberapa komoditas lainnya.

Pada Januari 2025 inflasi y-on-y berada di angka 0,72 % dan pada Februari 2025 berada di angka -1,09%. Inflasi tahun ke tahun (y-on-y) mengalami kenaikan pada Maret 2025 dibandingkan Februari 2025. Inflasi y-on-y Kabupaten Kampar pada Maret 2025 ini lebih rendah dibandingkan inflasi y-on-y Provinsi 0,68% dan Nasional yaitu sebesar 1,03%.

Risiko ke depan yang dikhawatirkan yaitu terkait dengan cuaca dimana BMKG memprediksi musim hujan pada tahun 2025 khususnya di wilayah Sumantra masih akan berlanjut, curah

hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan bencana banjir dan beresiko mempengaruhi produksi komoditas pangan di daerah penghasil Sumatera Barat, selain itu curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan tanah longsor terjadi pada ruas Jalan Nasional Riau – Sumbar yang menjadi jalur utama transportasi bahan pangan dari daerah penghasil sehingga dapat menghambat proses pengiriman bahan pangan ke Kampar.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam melakukan pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui TPID melakukan berbagai upaya konkret, antara lain melakukan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD teknis seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian TPH, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, Dinas Sosial serta Perangkat Daerah lainnya yang terkait. Hasil identifikasi permasalahan dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut :

- Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Kampar sebagian besar masih tergantung kepada daerah pemasok, yaitu antara lain dipasok dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah
- Pola konsumsi masyarakat yang secara umum mengkonsumsi jenis cabai pedas, beras pera yang dipasok sebagian besar dari Sumatera Barat juga berpengaruh terhadap permintaan dan peningkatan harga.
- Ketersediaan pasokan dan harga pangan di Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi oleh produksi di daerah penghasil dan juga dipengaruhi oleh kondisi dan kelancaran jalur disamping itu faktor alam seperti cuaca juga sangat mempengaruhi ketersediaan dan harga di pasaran.
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar melalui TPID terus berupaya semaksimal mungkin, antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Kabupaten Kampar mengoptimalkan realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan yang ada di masing-masing OPD terkait, antara lain terkait dengan peningkatan produksi, ketahanan pangan, kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan kegiatan lainnya yang terkait.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar antara lain:

1. Melakukan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah Pada Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar
2. Melakukan gerakan menanam komoditi penyumbang inflasi antara lain padi dan cabai
3. Optimalisasi produksi pangan, melalui penyaluran bantuan Sarana Produksi pangan kepada petani, berupa bibit sayuran di 10 kecamatan
4. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat Kecamatan dan Desa pada 21 Kecamatan (berupa peningkatan SDM petugas dan petani)
5. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa pada

21 Kecamatan (melalui pembentukan kelembagaan petani, pembentukan lembaga usaha tani, pembentukan mimbar sarasehan tingkat Kecamatan dan Kabupaten)

6. Melakukan koordinasi dengan daerah penghasil pangan, antara lain ke Kabupaten Limapuluh Kota, Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka membangun sinergi pelaksanaan pengendalian inflasi, maka perlu terus meningkatkan koordinasi antar OPD dan pihak-pihak yang terkait dengan pengendalian inflasi. Perlunya meningkatkan koordinasi antara TPID Kabupaten Kampar dengan TPID Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyediaan dan pendistribusian barang komoditas yang produksinya terbatas atau berada di luar Kabupaten Kampar.

Perlu mengoptimalkan monitoring perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di lapangan dengan melakukan sidak pasar secara berkala dan melakukan monitoring harga pasar setiap hari.

Perlu melakukan pengawasan terhadap distributor pangan pokok secara berkala sehingga dapat mencegah mall trading yang berdampak terhadap kestabilan harga pasar (seperti penimbunan dan penggunaan bahan-bahan yang melanggar ketentuan yang berlaku), melakukan monitoring ketersediaan pangan pokok dibawah koordinasi BULOG Cabang Kampar, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain melalui sinergi Dinas Perhubungan bersama kepolisian dalam rangka kelancaran arus lalu lintas dan distribusi barang.

Perlu mengoptimalkan produksi di daerah, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong di desa/kelurahan di seluruh wilayah di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan jumlah luasan tanaman padi di Wilayah Kabupaten Kampar, sehingga masing-masing wilayah dapat mewujudkan kemandirian pangan, dengan demikian inflasi di daerah dapat terkendali.

OPD terkait mengalokasikan anggaran program/kegiatan yang mendukung pengendalian inflasi daerah melalui APBD Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2025

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah yang perlu di lakukan adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan langkah strategis pengendalian inflasi, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengendalikan inflasi antara lain :

- Melakukan Sidak Pasar secara berkala dan melakukan monitoring harga pasar yang dilakukan setiap hari
- Melakukan gerakan menanam komoditi penyumbang inflasi antara lain padi dan cabai
- Melakukan koordinasi dengan daerah penghasil pangan, antara lain ke Kabupaten Limapuluh Kota, Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Tanah Datar dan

Kabupaten Solok

- Melakukan tindak lanjut Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa daerah pemasok pangan antara lain dengan Kab. Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan.
- Melakukan percepatan realisasi program/kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh OPD terkait.
- Melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi dari daerah penghasil komoditas, serta menindaklanjuti dengan melakukan Kerjasama Antar Daerah
- Mengoptimalkan Rapat Koordinasi bersama anggota TPID dan stake holder terkait
- Mengalokasikan dan merealisasikan penggunaan dana BTT melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan pemerintah pusat, antara lain untuk mendukung kegiatan operasi pasar, subsidi transportasi dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku
- Berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain melalui sinergi Dinas Perhubungan bersama kepolisian dalam rangka kelancaran arus lalu lintas dan distribusi barang.
- Mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
- Mengikuti Rapat Koordinasi Rutin Mingguan setiap Hari Senin Bersama Mendagri
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis TPID Kabupaten Kampar
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait